

PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, DAN UKURAN PEMDA TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Eka Sintala Dewi Anjani

Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

E-mail: eka.sintala@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find empirical evidence about the influence of the Local Own-Source Revenue, Intergovernmental Revenue and the Size of the Local Government on capital expenditure Local Government in NTB, using a Partial Least Square (PLS) analysis. The assessments had been undertaken to the government of West Nusa Tenggara Province and 10 cities/districts representing all local governments within West Nusa Tenggara, using secondary data such as annual financial reports of West Nusa Tenggara government during period 2009 to 2013. The results provide evidence that the Local Own-source Revenue and Intergovernmental Revenue significant positive effect on capital expenditure, while the size of the Local Government does not affect the capital expenditures of local government in NTB. The results could be used in NTB regional government in making policy management of local revenue sources for capital expenditure.

Keywords: capital expenditure, local own-source revenue, intergovernmental revenue, size of local government

JEL Classification: H72, R12

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu dampak dari adanya otonomi daerah, karena pemerintah daerah (pemda) diberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar untuk mengelola sumber-sumber kekayaan dan potensi-potensi kekayaan yang dimiliki serta dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik yang lebih prima. Salah satu bentuk nyata dari pelayanan pemda kepada publik adalah tersedianya infrastruktur, sarana, dan prasarana yang memadai. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana publik maka dibutuhkan belanja modal.

Belanja modal menurut Permendagri 13 tahun 2006 pasal 53 ayat 1 adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembelian aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Selama tahun 2009 sampai dengan 2013 Pemda di NTB yang terdiri dari 1 (satu) provinsi, 8 (delapan) kabupaten, dan 2 (dua) kota telah merealisasikan belanja daerah mencapai angka Rp42,799 triliun¹. Sementara belanja modal hanya mencapai Rp8,098 triliun dengan tren

¹⁾ DJPK Kementerian Keuangan RI.

fluktuatif. Proporsi belanja modal Pemda di NTB masih di bawah target rata-rata nasional. Jika total belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah, maka proporsi belanja modal Pemda di NTB ada di angka 18,90%. Angka ini masih di bawah angka target rata-rata nasional untuk proporsi belanja modal yaitu di antara 22%-29%². Perbandingan total belanja modal dan belanja daerah di NTB dapat di lihat pada Tabel 1 berikut ini:

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa proporsi belanja modal Pemda di Provinsi NTB belum mencapai target nasional selama tahun 2009 sampai dengan 2013. Oleh karena itu, Pemda di Provinsi NTB diharapkan dapat memperhatikan proporsi belanja modal, mengingat pentingnya belanja modal untuk menunjang tugas pemerintahan dan layanan publik yang sejalan dengan semangat otonomi daerah.

Sumber-sumber pendapatan pemda yang tertuang di dalam APBD dan dapat digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan termasuk untuk belanja modal di antaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta lain-lain pendapatan yang sah. Hampir 73% sumber pendapatan daerah di Provinsi NTB berasal dari Dana Perimbangan, 13% berasal dari PAD, dan 10% berasal dari lain-lain pendapatan yang sah.

Belanja modal pemda dapat dipengaruhi oleh jumlah Dana Perimbangan yang diterima Pemda dari Pemerintah Pusat (Abdullah dan Halim (2006) serta Subowo dan Wati (2010)). Belanja modal juga dapat dipengaruhi jumlah PAD yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah (Nuarisa, 2013 dan Mayasari et al. (2014). Sebaliknya, studi Abdulah dan Halim (2006) dan Wandira (2013) menemukan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal Pemda.

Selain Pendapatan Daerah yang berupa Dana Perimbangan dan PAD, ukuran Pemerintah Daerah juga berpengaruh terhadap realisasi belanja modal pemda. Studi Manik dan Suprihartini (2013), mengungkapkan bahwa Ukuran Pemda yang diprosikan dengan total aset berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin besar suatu ukuran pemda, maka kebutuhan sarana dan prasarana juga semakin besar.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, kondisi belanja modal di NTB yang belum mencapai target nasional dan menunjukkan tren fluktuatif, tren PAD yang fluktuatif, serta tren Dana Perimbangan yang cenderung meningkat setiap tahun. Berdasarkan motivasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi NTB.

Tabel 1
Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Daerah di Provinsi NTB

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Daerah
2009	1.111.132.301.855,80	6.210.976.777.131,38	17,89%
2010	1.103.754.731.228,00	7.119.647.771.770,56	15,50%
2011	1.831.191.401.635,11	8.649.488.080.215,74	21,17%
2012	1.797.710.714.120,34	9.783.754.039.074,94	18,37%
2013	2.246.020.538.219,80	11.036.029.013.855,20	20,35%
Total	8.089.809.687.059,05	42.799.895.682.047,80	18,90%

Sumber: DJPK. Data diolah, 2015.

²⁾ Kementerian Dalam Negeri yang dikutip dari Sugiono (2014).

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Mewujudkan realisasi belanja modal tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Realisasi PAD yang masih minim belum mampu menutupi kebutuhan keuangan pemda, sehingga tambahan dana dari pemerintah pusat sangat diperlukan. Dana Perimbangan merupakan dana yang dapat membantu pemda untuk menambah pendapatan daerah dengan harapan apabila terjadi penambahan sumber pendapatan maka realisasi belanja modal dapat ditingkatkan setiap tahunnya. Pemda juga dapat termotivasi untuk lebih meningkatkan realisasi belanja modalnya dengan melihat ukuran pemerintahan daerahnya yang diproksikan dengan total aktiva/aset.

Belanja modal merupakan belanja yang dianggap lebih produktif dibandingkan belanja daerah yang lain seperti belanja pegawai dan belanja rutin lainnya. PAD merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan pemda untuk membiayai belanja modal. Pemda lebih leluasa menggunakan PAD untuk belanja daerah terutama belanja modal, karena pemda memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan pendapatan yang berasal dari potensi asli daerahnya. Studi Nurisa (2013) dan Mayasari et al. (2014) melihat ada pengaruh positif PAD terhadap belanja modal. Artinya, apabila PAD meningkat maka belanja modal pemda juga meningkat dan sebaliknya. Berbeda dengan studi Abdullah dan Halim (2006) dan Wandira (2013) yang melihat PAD tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal Pemda. Artinya, PAD belum digunakan optimal untuk belanja modal, dan masih banyak digunakan untuk belanja yang lain seperti belanja pegawai dan sebagainya.

Pemda di NTB dapat mengoptimalkan penggunaan PAD untuk belanja modal terutama untuk belanja modal yang dapat mempengaruhi langsung pada layanan publik. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Kontribusi PAD yang hanya 13% pada total pendapatan pemda di Provinsi NTB belum mampu untuk memenuhi kebutuhan akan belanja daerah terutama belanja modal, sehingga dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan masih dibutuhkan. Dana Perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan

DAK dapat digunakan pemda untuk merealisasikan sejumlah belanja termasuk belanja modal.

Penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat mempengaruhi Belanja Modal pemda (Abdullah dan Halim, 2006). Studi Subowo dan Wati (2010) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap Belanja Modal pemda. Artinya semakin tinggi dana perimbangan yang diterima maka semakin tinggi pula realisasi Belanja Modal pemda.

Meskipun penggunaan dana perimbangan masih mendapat campur tangan pemerintah pusat, namun dengan perencanaan yang matang dan pro rakyat, pemda di Provinsi NTB dapat menggunakannya untuk lebih meningkatkan belanja modal setiap tahunnya. Dengan demikian hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Selain faktor pendapatan, ukuran pemerintah daerah juga mempengaruhi belanja modal (Manik dan Suprihartini, 2013). Artinya, semakin besar ukuran pemerintahan suatu daerah maka kebutuhan akan infrastruktur, sarana, dan prasarana wilayah juga semakin meningkat. Mempertimbangkan kebutuhan akan sarana dan prasarana wilayah dalam proses perencanaan anggaran akan membantu pemda untuk memprioritaskan belanja modal yang dapat memenuhi layanan kepada masyarakat. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian adalah :

H3 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan tingkatannya, jenis penelitian kali ini digolongkan ke dalam penelitian explanatory. Menurut Sukandarrumidi (2006:105), penelitian explanatory, merupakan penelitian untuk menguji hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Hubungan sebab akibat ini disebut juga hubungan kausal. Penelitian ini mengambil seluruh populasi sebagai sampel, sehingga disebut sebagai penelitian sensus. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi NTB yang terdiri dari 1 pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten, dan 2 pemerintah kota.

Belanja modal dalam penelitian ini diukur dengan total realisasi belanja modal yang tercantum

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013. Pendapatan Asli Daerah diukur dengan total realisasi PAD dalam LKPD tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013. Dana Perimbangan diukur dengan total dana perimbangan berupa DBH, DAU, dan DAK dalam LKPD tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013. Sementara ukuran pemerintah daerah diukur dengan Total Aset yang ada pada Neraca tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012.

Analisis statistik yang digunakan adalah model struktural dengan alat analisis Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 2.0.m3. PLS merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Hipotesis dalam penelitian ini diterima apabila memiliki nilai t statistics (t hitung) pada tabel Path Coefficient output SmartPLS 2.0 M3 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,64 (Jogiyanto, 2011:73).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil olah data SmartPLs 2.0.m3, model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

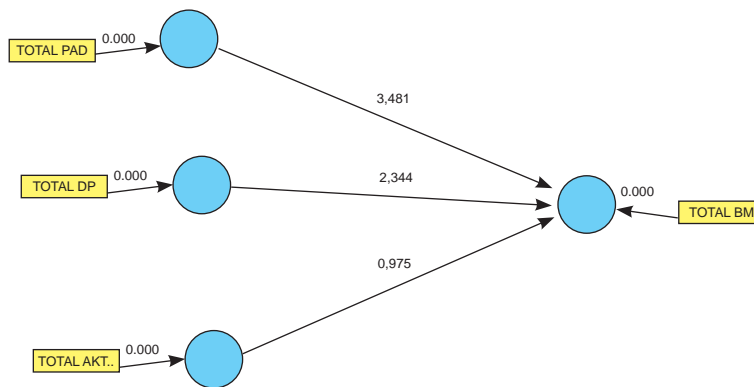
Berdasarkan hasil kalkulasi algoritma diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
R Square

Konstruk	R Square
BM	0,6835
DP	
PAD	
UK.PEMDA	

Sumber: Output SmartPLs, 2015.

Tabel 2 menjelaskan bahwa nilai R² dalam penelitian ini adalah 68,35%. Artinya variabel belanja modal mampu dijelaskan oleh variabel PAD, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemda sebanyak 68,35% dan sisanya 31.65% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Selain itu, ketiga variabel eksogen masuk dalam kategori kuat dalam menerangkan variabel endogen karena nilai R² > 0,64. Perhitungan Goodness of Fit model penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Hasil Bootstrapping

Tabel 2
Goodness of Fit

	R-Square	Communality	GOF
BM	0,6835	1	0,68
PAD		1	
DP		1	
UK.PEMDA		1	
Rerata	0,6835	1	

Sumber: Output SmartPls, 2015.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui GOF dalam penelitian ini adalah 0,68. Artinya, model dalam penelitian ini masuk dalam kategori kuat karena Index GOF > 0,36. Sementara itu, berdasarkan hasil bootstrapping SmartPLS dapat diringkas hasil pengujian hipotesis penelitian ini, seperti yang tercantum dalam Tabel 3 berikut ini:

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa H1 dan H2 diterima karena nilai t-statistiknya > 1,64 dan koefisien parameternya bertanda positif. Sementara H3 dalam penelitian ini ditolak karena nilai t statistik < 1,64 dan koefisien parameternya bertanda negatif.

PEMBAHASAN

Hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, artinya PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pada pemda di Provinsi NTB. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD yang diterima pemda maka semakin tinggi pula realisasi belanja modal, dan sebaliknya.

Meskipun PAD hanya dikisaran 13% dari total pendapatan Pemda di NTB, namun PAD dapat digunakan secara lebih leluasa untuk belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuarisa (2013) dan Mayasari et al. (2014), yang menemukan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sementara itu, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Abdullah dan Halim (2006) dan Wandira (2013) yang melihat PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal Pemda. Hal ini mengindikasikan PAD masih digunakan untuk belanja di luar dari belanja modal seperti belanja operasional.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima, artinya bahwa semakin tinggi penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat, maka realisasi belanja modal pemda di Provinsi NTB semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan khususnya DAK dan DBH sudah digunakan secara optimal untuk belanja modal, karena penerimaan DAU sudah diamanatkan untuk membiayai belanja yang menjadi prioritas pemda yaitu belanja pegawai. Ke depan pemda di Provinsi NTB dapat lebih kreatif merancang program-program yang bersinergi dengan Pemerintah terutama program/kegiatan yang menunjang layanan kepada publik seperti penyediaan sarana dan prasarana publik, sehingga akan menambah realisasi belanja modal setiap tahunnya.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Artinya, Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal Pemda di NTB. Hal ini mengindikasikan bahwa total aset yang menjadi proksi dari ukuran pemda tidak dijadikan sebagai pertimbangan awal dalam merancang dan merealisasikan belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Manik dan Suprihartini (2013) yang menghasilkan ukuran pemda dengan proksi total aset berpengaruh terhadap penggunaan belanja modal.

Ke depan Pemda di NTB diharapkan lebih cermat dalam merancang dan merealisasikan belanja

Tabel 3
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean(O)	T Statistics ((O/STERR))	Hipotesis	Keterangan
PAD -> BM	0,6099	0,5818	3,4807	H1	Diterima
DP -> BM	0,3093	0,3208	2,344	H2	Diterima
UK.PEMDA -> BM	-0,0756	-0,0801	0,9746	H3	Ditolak

Sumber: Output SmartPLS, 2015.

modal yang menyentuh langsung pada pelayanan publik dengan mempertimbangkan variabel selain variabel pendapatan, yaitu total aset yang di dalam neraca pemda. Hal ini dikarenakan, total aset yang dimiliki merupakan cerminan dari kekayaan yang dimiliki pemda di akhir tahun anggaran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan alokasi belanja terutama belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi NTB, namun ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemda di Provinsi NTB.

Saran

Penelitian ini mengambil rentan waktu penelitian hanya 5 tahun anggaran. Pada penelitian mendatang disarankan menambah rentang waktu penelitian sehingga hasilnya dapat lebih baik karena menggunakan sumber data penelitian dengan waktu lebih panjang. Ukuran Pemerintah Daerah dapat diprosikan dengan selain total aktiva, sehingga penelitian ke depan dapat menguji ukuran pemda dengan proksi seperti jumlah penduduk dan luas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. dan A. Halim. 2006. "Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (2): 17-32.

Jogiyanto. 2011. *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Manik, T. dan L. Suprihartini. 2013. "Analisis Pengaruh Pelaksanaan Manajemen Publik melalui

Pengukuran Value For Money dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Belanja Modal: Studi Empiris di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012. *JEMI*, 4 (2): 15-30.

Mayasari, L. P. R., N. K. Sinarwati dan G.A. Yuniarta. 2014. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*, 2 (1).

Nuarisa, S. A. 2013. "Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Accounting Analysis Journal*, 2(1): 89-95.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Subowo dan E. R. Wati. 2010. "Hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2 (2): 73-82.

Sugiono, S. 2014. "Pengaruh Moderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Hubungan Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2 (3): 1-27.

Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Bagi Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Wandira, A. G. 2013. "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2 (1): 44-51.

www.djpk.depkeu.go.id

www.ntbprov.go.id